

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.03.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tentang Penghapusan Frasa “Kecuali terhadap Putusan Bebas” dalam Pasal 244 KUHAP.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466 K/Pid/2024 (kasasi atas Putusan PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penerapan Keadilan Restoratif

Buku & Jurnal

Abidin, Rijal Fa'iq Walid, and Maulana Iqbal Fadhlurrahman. "Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (January 27, 2025): 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>.

Arief, M. Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher, 2021.

Batubara, Reyfian Ferionanda. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan: Nomor. 217/Pid. B/2021/Pn. Dum)." Universitas Medan Area, 2025.

Dwianisa, Shindy. "Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 5, no. 1 (March 30, 2025): 375–84. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i1.11490>.

Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (August 3, 2023): 52–64. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.

Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 23, 2024): 1035–50. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.

Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. "IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (December 15, 2024): 86–98. <https://doi.org/10.70079/LEL.V1I2.72>.

Kejaksaan RI. "3 Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Didakwa Terima Suap Rp4,6 Miliar," 2024. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp46-miliar-265756-mvk.html?screen=1>.

Kompas. "Tiga Hakim Pembebas Ronald Tannur Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa," 2025. <https://www.kompas.id/artikel/tiga-hakim-pembebas-ronald-tannur-divonis-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa>.

Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (May 1, 2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

Martinelli, Imelda, Ellen Chang, Natania Frederica, and Sherlyana Indah Saputri. "TEORI HANS KELSEN DALAM MEMAKNAI TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN UTANG-PIUTANG: Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN Sos." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 1 (April 28, 2025): 130–39. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1099>.

Mayendra, Muhammad Cahye, Sukinta Sukinta, and Kartika Widya Utama. "TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA.” *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (October 31, 2024). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45488>.

Prasetyo, Aji. “Eks Ketua PN Surabaya Dituntut 7 Tahun Penjara Di Kasus Suap Ronald Tannur,” 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-ketua-pn-surabaya-dituntut-7-tahun-penjara-di-kasus-suap-ronald-tannur-lt688759d837c31/>.

Rachmawati, Fitria, and Sri Wahyuningsih Yulianti. “Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik.” *Verstek* 7, no. 3 (December 23, 2019): 32–40. <https://doi.org/10.20961/JV.V7I3.38264>.

Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y. Badilla, Apriyanto Apriyanto, and Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Sasmita, and Hasuri. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg).” *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (December 22, 2023): 139–58. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i2.3819>.

Sugianto, Fajar, Ellyana Herawati, Hadi Mustopa, Metty Sander, and Jecika Fujianti. “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa Di Bidang Ekonomi.” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (July 16, 2025): 2819–31.

<https://doi.org/10.59188/JURNALSOSTECH.V5I7.32225>.

Sunoto (2016). “KUHP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dan Putusan Lepas.” Accessed February 4, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/kuhap-baruperbedaan-perlakuan-upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>.

Tumuhulawa, Arifin, Ferari D. Susilo, and Ramdan Kasim. “Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel.” *Jurnal Hukum Bisnis* 2, no. 2 (July 8, 2024): 95–109. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v2i2.169>.

Watimpres. “3 Hakim Tersangka Suap Ronald Tannur Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI),” 2024. <https://wantimpres.go.id/id/issue/3-hakim-tersangka-suap-ronald-tannur/>.

Zainal, Muhammad, and Kholidazia El. HF. “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (March 3, 2022): 113–41. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>.